

SALINAN
NOMOR 8/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan penyesuaian beberapa rincian obyek belanja untuk keperluan mendesak yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

- d. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 350/P/2020 Tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020;
- e. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3419/P/2020 Tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang III Tahun 2020;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 91 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	731.100.229.507,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.218.947.574.052,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	369.770.201.010,09	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.		2.319.818.004.569,09

2. Belanja Daerah:

- a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	944.784.683.452,54	
2) Belanja Hibah	Rp.	116.449.612.951,60	
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	12.819.760.000,00	
4) Belanja Tidak Terduga	Rp.	33.074.193.691,15	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.		1.107.128.250.095,29

b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	185.698.365.642,40	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	863.517.977.686,50	
3) Belanja Modal	Rp.	608.261.043.141,50	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.657.477.386.470,40	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp.	2.764.605.636.565,69	
Defisit setelah Perubahan	Rp.	(444.787.631.996,60)	
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	484.625.295.873,60	
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	39.837.663.877,00	
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp.	444.787.631.996,60	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp.	0,00	

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Lampiran IA diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Maret 2020

WALIKOTA MALANG,

ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya ,
KEPALA BAGIAN HUKUM


TABRANI, SH, M. Hum
Pembina Tk.I

19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2020

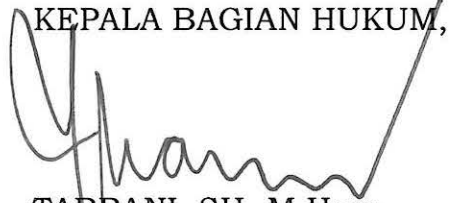
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	2,289,322,092,017.09	2,319,818,004,569.09	30,495,912,552.00	1.33
1.1	Pendapatan Asli Daerah	731,100,229,507.00	731,100,229,507.00	0.00	0.00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	621,053,137,049.00	621,053,137,049.00	0.00	0.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	45,724,817,200.00	45,724,817,200.00	0.00	0.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30,130,277,258.00	30,130,277,258.00	0.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34,191,998,000.00	34,191,998,000.00	0.00	0.00
1.2	Dana Perimbangan	1,224,050,117,000.00	1,218,947,574,052.00	(5,102,542,948.00)	(0.41)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	114,205,003,000.00	111,492,601,000.00	(2,712,402,000.00)	(2.37)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	898,383,132,000.00	898,383,132,000.00	0.00	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	211,461,982,000.00	209,071,841,052.00	(2,390,140,948.00)	(1.13)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	334,171,745,510.09	369,770,201,010.09	35,598,455,500.00	10.65
1.3.1	Pendapatan Hibah	96,746,600,000.00	102,845,055,500.00	6,098,455,500.00	6.30
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	182,924,766,510.09	182,924,766,510.09	0.00	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51,042,020,000.00	51,042,020,000.00	0.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,458,359,000.00	32,958,359,000.00	29,500,000,000.00	853.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2,289,322,092,017.09	2,319,818,004,569.09	30,495,912,552.00	1.33
2	BELANJA	2,734,109,724,013.69	2,764,605,636,565.69	30,495,912,552.00	1.11
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,078,989,860,250.29	1,107,128,250,095.29	28,138,389,845.00	2.60
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	947,081,464,452.54	944,784,683,452.54	(2,296,781,000.00)	(0.24)
2.1.4	BELANJA HIBAH	116,449,612,951.60	116,449,612,951.60	0.00	0.00
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	12,819,760,000.00	12,819,760,000.00	0.00	0.00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,639,022,846.15	33,074,193,691.15	30,435,170,845.00	1,153.27

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	1,655,119,863,763.40	1,657,477,386,470.40	2,357,522,707.00	0.14
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	188,395,248,642.40	185,698,365,642.40	(2,696,883,000.00)	(1.43)
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	838,687,320,039.50	863,517,977,686.50	24,830,657,647.00	2.96
2.2.3	BELANJA MODAL	628,037,295,081.50	608,261,043,141.50	(19,776,251,940.00)	(3.14)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2,734,109,724,013.69	2,764,605,636,565.69	30,495,912,552.00	1.12
	Surplus / (Defisit)	(444,787,631,996.60)	(444,787,631,996.60)	0.00	0.00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	484,625,295,873.60	484,625,295,873.60	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	484,625,295,873.60	484,625,295,873.60	0.00	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	39,837,663,877.00	39,837,663,877.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	39,837,663,877.00	39,837,663,877.00	0.00	0.00
	Pembiayaan Netto	444,787,631,996.60	444,787,631,996.60	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	0.00	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

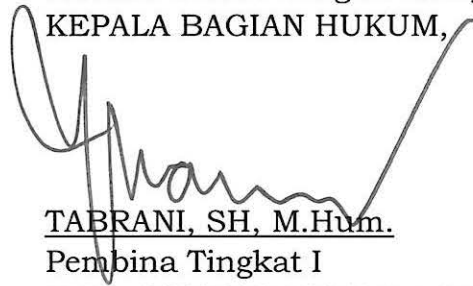
LAMPIRAN I.A
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
 APBD TAHUN ANGGARAN 2020

**RINGKASAN KODE REKENING APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Kode Rekening	Nama Rekening	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	04	PENDAPATAN DAERAH	2,289,322,092,017.09	2,319,818,004,569.09	30,495,912,552.00
2	0401	Pendapatan Asli Daerah	731,100,229,507.00	731,100,229,507.00	0.00
3	040101	Hasil Pajak Daerah	621,053,137,049.00	621,053,137,049.00	0.00
4	04010101	Pajak Hotel	78,500,000,000.00	78,500,000,000.00	0.00
5	0401010103	Hotel Bintang Empat	36,357,894,736.84	36,357,894,736.84	0.00
6	0401010104	Hotel Bintang Tiga	20,657,894,736.84	20,657,894,736.84	0.00
7	0401010105	Hotel Bintang Dua	6,941,052,631.58	6,941,052,631.58	0.00
8	0401010107	Hotel Melati	7,611,709,531.58	7,611,709,531.58	0.00
9	0401010113	Wisma Pariwisata	495,789,473.68	495,789,473.68	0.00
10	0401010115	Guest House	1,239,473,684.22	1,239,473,684.22	0.00
11	0401010116	Rumah Kos	5,196,185,205.26	5,196,185,205.26	0.00
12	04010102	Pajak Restoran	128,000,000,000.00	128,000,000,000.00	0.00
13	0401010201	Restoran	65,368,965,138.02	65,368,965,138.02	0.00
14	0401010202	Rumah Makan	52,251,182,228.09	52,251,182,228.09	0.00
15	0401010203	Cafeteria	10,379,852,633.89	10,379,852,633.89	0.00
16	04010103	Pajak Hiburan	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	0.00
17	0401010301	Tontonan Film/Bioskop	11,562,500,000.00	11,562,500,000.00	0.00
18	0401010302	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	1,171,875,000.00	1,171,875,000.00	0.00
19	0401010305	Pameran	234,375,000.00	234,375,000.00	0.00
20	0401010307	Karaoke	3,242,187,500.00	3,242,187,500.00	0.00
21	0401010315	Permainan Ketangkasan	2,343,750,000.00	2,343,750,000.00	0.00
22	0401010316	Panti Pijat/Refleksi	546,875,000.00	546,875,000.00	0.00

No	Kode Rekening	Nama Rekening	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
785	0601010411	Belanja Tidak Terduga	387,495,333,051.60	387,495,333,051.60	0.00
786	0602	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	39,837,663,877.00	39,837,663,877.00	0.00
787	060202	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	39,837,663,877.00	39,837,663,877.00	0.00
788	06020202	Badan usaha milik daerah (BUMD)	39,837,663,877.00	39,837,663,877.00	0.00
789	0602020201	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00
790	0602020202	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	0.00
791	0602020203	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	12,337,663,877.00	12,337,663,877.00	0.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
 APBD TAHUN ANGGARAN 2020

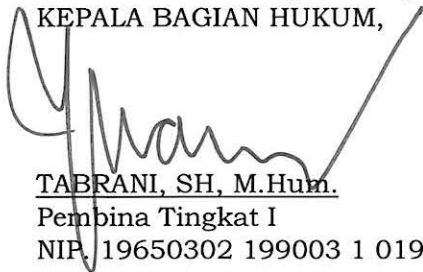
PEMERINTAH KOTA MALANG
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN		
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%			
1							2	3	4	5	6	7		
1.01	1.01.01	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00			
1.01	1.01.01	00	00	4	1		Pendapatan Asli Daerah	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00			
1.01	1.01.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00			
1.01	1.01.01	00	00	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)	
1.01	1.01.01	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00		0.00
1.01	1.01.01	00	00	4	2			Dana Perimbangan				0.00		
1.01	1.01.01	00	00	4	3			Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				0.00		
							PENDAPATAN DAERAH	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00			
1.01	1.01.01	00	00	5			BELANJA							
1.01	1.01.01	00	00	5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	321,709,589,905.09	339,275,608,755.09	17,566,018,850.00	5.46			
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	321,709,589,905.09	339,275,608,755.09	17,566,018,850.00	5.46			
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	302,476,771,398.76	321,050,243,533.21	18,573,472,134.45	6.14		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	142,957,784,600.39	169,252,633,250.00	26,294,848,649.61	18.39	
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	14,904,953,000.00	13,857,922,000.00	(1,047,031,000.00)	(7.02)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 Thn 169,252,633,250.00 169,252,633,250.00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	327,855,450.00	232,764,300.00	(95,091,150.00)	(29.00)	Tunjangan Keluarga 1.00 Thn 13,857,922,000.00 13,857,922,000.00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	21,119,359,000.00	13,713,349,000.00	(7,406,010,000.00)	(35.06)	Tunjangan Jabatan 1.00 Thn 232,764,300.00 232,764,300.00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	732,255,700.00	1,185,034,900.00	452,779,200.00	61.83	Tunjangan Fungsional 1.00 Thn 13,713,349,000.00 13,713,349,000.00
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	8,960,132,800.00	8,003,892,000.00	(956,240,800.00)	(10.67)	Tunjangan Fungsional Umum 1.00 Thn 1,185,034,900.00 1,185,034,900.00

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
4.06	4.06.0511	22	172	5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
4.06	4.06.0511	22	172	5	2	3	16 03	Belanja modal pengadaan proyektor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
								Jumlah Belanja	2,048,929,000.00	2,046,319,000.00	(2,610,000.00)	(0.13)	
								Surplus / (Defisit)	(2,048,929,000.00)	(2,046,319,000.00)	2,610,000.00	100.00	
4.06	4.06.0511	00	00	6				PEMBIAYAAN DAERAH					
4.06	4.06.0511	00	00	6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah				0.00	
4.06	4.06.0511	00	00	6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah				0.00	
								Pembiayaan Netto	0.00	0.00	0.00	100.00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI